

## Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Sulawesi Utara

Wili Yanti Paputungan<sup>1</sup>, Tri Oldy Rotinsulu<sup>2</sup>, Een N. Walewangko<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi  
Pascasarjana  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail: [wilipaputungan061@student.unsrat.ac.id](mailto:wilipaputungan061@student.unsrat.ac.id), [o\\_rotinsulu@unsrat.ac.id](mailto:o_rotinsulu@unsrat.ac.id), [eenwalewangko@unsrat.ac.id](mailto:eenwalewangko@unsrat.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan dua metode yaitu Inclusive Growth Index (IGI) dan analisis regresi linear. Hasil perhitungan IGI menunjukkan bahwa, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara cenderung bersifat inklusif terhadap penurunan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan. Sementara itu, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial, variabel tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan gini ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menyiratkan bahwa, meskipun secara teoretis variabel-variabel tersebut saling berhubungan, dalam kerangka model dan periode penelitian (2018–2024), perubahan pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan belum memberikan dampak yang berarti secara statistik terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci : Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Sulawesi Utara.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of inclusive economic growth on poverty, unemployment, and income inequality in North Sulawesi Province. The methodology used in this research is a quantitative approach with two methods, namely the Inclusive Growth Index (IGI) and multiple linear regression analysis. The results of the IGI calculation indicate that, on average, economic growth in North Sulawesi tends to be inclusive in reducing poverty, creating jobs, and ensuring income distribution. Meanwhile, the results of the multiple linear regression analysis show that, partially, the variables of poverty rate, open unemployment rate, and the Gini ratio have no significant effect on economic growth. These findings suggest that, although these variables are theoretically interrelated, in the framework of the model and the study period (2018–2024), changes in poverty, unemployment, and income inequality have not statistically impacted the region's economic growth rate in a significant manner.

Keywords: Poverty, Income Inequality, Unemployment, Economic Growth, North Sulawesi.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun regional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah yang diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Todaro & Smith, 2015). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara (Sukirno (2016). Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang dan jasa ekonomi bagi penduduknya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya output secara berkelanjutan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan masih sering muncul meskipun ekonomi secara agregat tumbuh positif. Pembangunan seharusnya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memperluas kapabilitas dan pilihan hidupnya. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan publik hanya akan

memperdalam ketimpangan sosial. Dalam konteks inilah, konsep pertumbuhan ekonomi inklusif hadir sebagai paradigma pembangunan baru yang menekankan pertumbuhan yang bersifat *pro poor* (mampu menurunkan kemiskinan), *pro-job* (mampu menciptakan lapangan kerja), dan *pro equity* (mampu mengurangi ketimpangan).

Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya berfokus pada percepatan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Ali & Son, 2007). Pertumbuhan inklusif harus mengintegrasikan dimensi pemerataan dalam setiap tahap pembangunan ekonomi (Kakwani & Pernia, 2000). Dengan demikian, pertumbuhan inklusif menekankan bukan hanya pada seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga pada seberapa luas manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Analisis yang mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana pembangunan telah berhasil menyejahterakan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Utara daerah di kawasan timur Indonesia, memiliki dinamika ekonomi yang cukup menarik untuk dikaji dalam kerangka pertumbuhan inklusif. Berdasarkan data BPS (2025), pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2024 mencapai 5,39%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada pada 5,02%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa sektor unggulan, seperti pertanian, perdagangan besar-eceran, transportasi, dan perdagangan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,85%, masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di 4,91% (BPS, 2025). Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum berjalan optimal meskipun ekonomi tumbuh. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya risiko kesenjangan sosial di provinsi ini.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Sulawesi Utara. Menurut BPS (2025), jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada tahun 2024 sekitar 6,70% dari total penduduk. Meskipun angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realitasnya masih ada satu dari setiap empat belas penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan juga masih menjadi persoalan, dengan nilai gini ratio Sulawesi Utara mencapai 0,360 pada 2024, yang relatif stagnan selama satu dekade terakhir. Nilai tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi, meskipun tidak berbeda jauh dari rata-rata nasional yaitu 0,375.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Utara selama periode 2017–2024 memperlihatkan pola fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar tenaga kerja lokal. Pada 2017, TPT sebesar 7,18% turun menjadi 6,61% pada 2018 dan 6,01% pada 2019. Penurunan ini terjadi karena meningkatnya aktivitas pariwisata, meluasnya sektor perdagangan, serta perluasan lapangan kerja yang didorong oleh proyek infrastruktur dan aktivitas ekonomi kota-kota utama seperti Manado dan Bitung. Pandemi Covid-19 pada 2020 kembali meningkatkan TPT menjadi 7,37%, dipicu oleh penutupan hotel, restoran, pusat wisata, serta terganggunya sektor transportasi dan perdagangan yang menyebabkan banyak pekerja dirumahkan. Pada tahun ini pula, ribuan tenaga kerja pariwisata dan jasa mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga memengaruhi lonjakan pengangguran. Pada 2021, TPT turun menjadi 7,06% karena aktivitas ekonomi mulai kembali berjalan, disertai pembukaan kembali penerbangan, industri kuliner, dan perdagangan lokal. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan penurunan menjadi 6,61% dan 6,10%, seiring meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor jasa, perdagangan, dan logistik, khususnya setelah beroperasinya Pelabuhan Internasional Bitung. Tahun 2024 mencapai angka terendah yakni 5,85%, menunjukkan bahwa pemulihan pasar kerja telah berjalan lebih baik, meskipun masih terdapat tantangan berupa mismatch keterampilan, dominasi tenaga kerja informal, dan ketergantungan pada sektor tertentu.

Gini ratio Sulawesi Utara selama 2017–2024 mencerminkan tingkat ketimpangan yang cenderung menurun namun masih berada pada level sedang dan memerlukan pemerataan pembangunan yang lebih kuat. Nilai gini ratio sebesar 0,396 pada 2017 turun menjadi 0,394 pada 2018 dan 0,376 pada 2019 yang menunjukkan perbaikan pemerataan pendapatan seiring meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan sektor informal serta perdagangan. Pada 2020 nilai gini ratio turun menjadi 0,370 karena dampak pandemi yang secara relatif



menekan pendapatan hampir semua kelompok penduduk, sehingga jarak pendapatan antara kelompok kaya dan miskin sedikit menyempit. Tahun 2021–2022 nilai gini ratio stabil pada 0,365 yang menunjukkan bahwa pemulihan pendapatan berlangsung tetapi belum cukup untuk mengurangi ketimpangan secara signifikan. Tahun 2023 gini ratio kembali naik menjadi 0,370 sebagai akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata, di mana kelompok berpendapatan tinggi pulih lebih cepat dibandingkan kelompok rentan. Pada 2024, gini ratio menurun menjadi 0,360 yang merupakan capaian terbaik selama periode tersebut. Penurunan ini didorong oleh membaiknya pendapatan sektor pertanian dan perikanan, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, serta stabilnya harga pangan yang membantu memperkuat daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, stagnasi ketimpangan dalam jangka panjang menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini akan mengangkat pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, disamping meningkatkan pendapatan daerah juga menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara.

#### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pertumbuhan ekonomi inklusif berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi inklusif berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi inklusif berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi inklusif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara.

#### **Manfaat penelitian**

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan hubungannya dengan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan PDRB, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
3. Manfaat sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan serta mendukung terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Utara.

#### **Tinjauan Pustaka**

##### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Todaro dan Smith (2015) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi jangka panjang suatu negara atau daerah, yang tercermin dari kenaikan output nasional riil. Pandangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan hanya merupakan salah satu dimensi pembangunan, sehingga keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan semata, melainkan juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu memperbaiki distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Sejalan dengan itu, Kuncoro (2013) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam kenaikan Produk Domestik.

##### **Teori Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan konsep pembangunan yang menekankan pentingnya kesinambungan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan manfaat yang dihasilkan dari pertumbuhan tersebut. Pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Menurut (Boediono, 2002), pembangunan ekonomi yang tidak inklusif cenderung melahirkan *growth without equity*, yakni pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak disertai pemerataan. Kondisi ini akan memperlebar kesenjangan sosial karena hanya kelompok tertentu yang menikmati hasil pembangunan. Oleh sebab itu, pertumbuhan inklusif dianggap sebagai solusi untuk mendorong kesejahteraan yang lebih adil. Selain itu, menurut (Kuncoro, 2013), pertumbuhan inklusif juga penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik karena distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Dengan pertumbuhan inklusif, masyarakat miskin dan rentan tidak hanya menjadi penerima pasif, melainkan turut berperan sebagai pelaku dalam pembangunan.

### **Teori Kemiskinan**

Kemiskinan pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam pengertian yang sempit, kemiskinan dimaknai sebagai keadaan kekurangan uang maupun barang yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup. Sementara itu, dalam arti luas kemiskinan dipandang sebagai fenomena multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Menurut (Hamuyad dalam Khomsan *et al.*, 2008), kemiskinan tidak hanya dilihat dari kekurangan ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan dalam aspek sosial, budaya, dan politik.

### **Teori Pengangguran**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, namun sedang berusaha mencari kerja, mempersiapkan usaha baru, atau bahkan telah diterima bekerja tetapi belum mulai melaksanakan pekerjaannya. Definisi ini menegaskan bahwa pengangguran tidak hanya mencakup individu yang benar-benar tidak bekerja, tetapi juga mereka yang berada dalam fase transisi menuju dunia kerja. (Sukirno, 1994) memberikan definisi yang sejalan, yakni pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, namun belum berhasil memperolehnya. Akan tetapi, orang yang tidak bekerja dan tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Lebih lanjut, Sukirno menekankan bahwa faktor utama penyebab pengangguran adalah rendahnya pengeluaran agregat dalam perekonomian. Hal ini dapat dipahami karena pengusaha hanya akan memproduksi barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan baru akan terwujud apabila hasil produksi dapat terserap pasar. Dengan kata lain, semakin besar permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, maka semakin tinggi pula tingkat produksi yang dilakukan, dan peningkatan produksi tersebut secara langsung akan memperluas kesempatan kerja.

### **Teori Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Ketimpangan atau disparitas antarwilayah merupakan fenomena yang wajar terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Kondisi ini muncul karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, karakteristik geografis, serta struktur demografi pada masing-masing wilayah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi menjadi tidak sama. (Kuncoro, 2006) menjelaskan bahwa ketimpangan dapat dipahami sebagai perbedaan standar hidup antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Perbedaan tersebut kemudian tercermin dalam variasi tingkat pembangunan di berbagai wilayah, yang pada akhirnya memunculkan jurang kesejahteraan atau gap ekonomi (Sukirno, 2010).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Gunawan Asnawi, Daisy Engka, dan Een N. Walewangko (2022) mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi di kedua daerah tersebut mampu berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran,



serta ketimpangan yang diukur melalui gini ratio. Variabel yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini ratio, serta PDRB ADHK di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada periode 2015–2021 yang bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara. Metode yang dipakai adalah *Inclusive Growth Index (IGI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2015–2021, pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut belum bersifat inklusif karena tidak mampu secara signifikan menekan angka kemiskinan, pengangguran, maupun ketimpangan, yang ditunjukkan dengan masih adanya kecenderungan pertumbuhan yang bersifat non- inklusif.

Penelitian dilakukan oleh Giofano Johannes Sipota, Een N. Walewangko, dan Irawaty Masloman (2024) yang berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat dikategorikan inklusif serta mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin selama periode 2015–2022, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Talaud. Analisis dilakukan dengan metode *Inclusive Growth Index (IGI)*, sehingga mampu mengukur kualitas pertumbuhan, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015–2017 pertumbuhan ekonomi di Talaud belum inklusif karena tidak mampu menekan angka kemiskinan. Namun, sejak tahun 2018 hingga 2021, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mulai bersifat inklusif. Hal ini berkaitan dengan adanya program pemerintah pusat seperti PKH, BPNT, KIS, KIP, dan bantuan sosial lainnya yang secara nyata berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

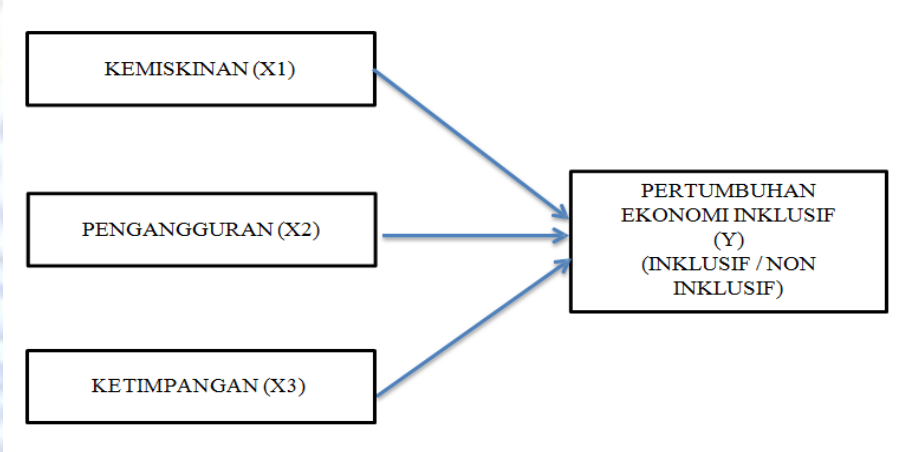
Pratama (2020) melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Jambi pada periode 2014–2018. Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur sekaligus menganalisis tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Variabel yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi inklusif, gini ratio, PDRB, kemiskinan, dan ketimpangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan *Inclusive Growth Index (IGI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai IGI Provinsi Jambi hanya mencapai 2,96, yang masuk dalam kategori belum memuaskan (nilai indeks < 4). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, kondisi tersebut tidak diikuti dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses maupun hasilnya.

Hartati (2021) meneliti pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan tujuan untuk mengukur tingkat inklusivitas pertumbuhan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Data penelitian berupa data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup periode 2010–2019, yang terdiri dari data pertumbuhan inklusif, belanja pemerintah, serta tingkat pengangguran terbuka. Metode analisis yang diterapkan adalah *Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)* dan regresi linier berganda dengan data *time series*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia selama satu dekade terakhir belum konsisten terjadi setiap tahun. Analisis regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Namun, pengeluaran pendidikan justru memiliki hubungan negatif, sementara belanja kesehatan memberikan dampak positif. Di sisi lain, variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyarankan agar kebijakan pemerintah lebih difokuskan pada penguatan program sosial, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pendidikan vokasi, serta peningkatan layanan kesehatan melalui penambahan fasilitas, tenaga medis, dan optimalisasi program KIS maupun BPJS.

Afriliana dan Wahyudi (2022) melakukan penelitian berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah

menganalisis tingkat pertumbuhan inklusif di 34 provinsi di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempercepat tercapainya pertumbuhan inklusif. Data penelitian menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dengan periode 2014–2020. Metode yang digunakan adalah *Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)* serta estimasi data panel dinamis dengan *Generalized Method of Moment Arellano-Bond (GMM-AB)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya bersifat inklusif. Beberapa variabel terbukti berpengaruh terhadap terciptanya pertumbuhan inklusif, yaitu pendapatan per kapita, belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, serta *Foreign Direct Investment (FDI)*. Sebaliknya, *Domestic Direct Investment (DDI)* tidak mendukung pertumbuhan inklusif di Indonesia.

Kerangka Pemikiran



2. METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, serta PDRB ADHK di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Seluruh data tersebut diperoleh melalui publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis

*Inclusive Growth Index (IGI)*

Metode Inklusif Growth Index (IGI) untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara bersifat inklusif. Indeks Pertumbuhan Inklusif (*Inclusive Growth Index/IGI*) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bersifat merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Indeks ini tidak hanya melihat dari sisi besarnya pertumbuhan ekonomi (seperti peningkatan PDRB), tetapi juga mempertimbangkan seberapa besar dampak pertumbuhan tersebut dalam menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memperkecil ketimpangan pendapatan.

1. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan adalah  $IGp = (Gpg/Gp) \hat{Gg}$   
Dimana :  
IGp : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan  
Gp : elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata  
Gpg : elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi  
 $\hat{Gg}$  : pertumbuhan ekonomi  
IGp menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai  $IGp > \hat{Gg}$ .
2. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran adalah  $IGp = (Gpg/Gp) \hat{Gg}$   
Dimana :  
IGp : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran



Gp : elastisitas pengangguran terhadap pendapatan rata-rata  
Gpg : elastisitas pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi  
Gg : pertumbuhan ekonomi  
IGp menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai IGp > Gg.

3. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan adalah  $IGp = (Gpg/Gp) \hat{Gg}$   
Dimana:  
IGp : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan  
Gp : elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan rata-rata  
Gpg : elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi  
Gg : pertumbuhan ekonomi  
IGp menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan ketimpangan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai IGp > Gg.
4. Jika  $IGp < \hat{Gg}$  berarti pertumbuhan ekonomi tidak bersifat inklusif.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah teknik analisis yang bertujuan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel dependen (Y) yang diteliti adalah Pertumbuhan Ekonomi, sementara variabel independen mencakup Tingkat Kemiskinan (X<sub>1</sub>), Tingkat Pengangguran (X<sub>2</sub>), dan Tingkat Ketimpangan (X<sub>3</sub>). Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan melalui fungsi berikut:

$$Y = F(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots(3.1)$$

Artinya, Pertumbuhan Ekonomi (Y) dipengaruhi oleh Tingkat Kemiskinan (X<sub>1</sub>), Tingkat Pengangguran (X<sub>2</sub>), dan Tingkat Ketimpangan (X<sub>3</sub>).

Untuk keperluan pengujian statistik, fungsi tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

Dimana:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- X<sub>1</sub> = Tingkat Kemiskinan
- X<sub>2</sub> = Tingkat Pengangguran
- X<sub>3</sub> = Tingkat Ketimpangan
- B<sub>0</sub> = Konstanta
- β<sub>1</sub> , β<sub>2</sub> , β<sub>3</sub> = Konstanta
- e = Error terms
- t = Time Series

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebagai langkah awal. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat-syarat statistik yang diperlukan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Uji Normalitas
- Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi, baik variabel dependen maupun independen, memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini penting karena asumsi normalitas menjadi salah satu syarat validitas dalam analisis regresi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah uji Jarque-Bera, yang dapat diakses melalui aplikasi EViews. Uji Jarque-Bera mengevaluasi perbedaan nilai skewness dan kurtosis dari data residual. Untuk menentukan apakah data residual terdistribusi normal, keputusan dapat dibuat dengan membandingkan nilai probabilitas (Prob. J-B) dengan tingkat signifikansi α = 0,05. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka residual dianggap mengikuti distribusi

normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas J-B lebih kecil dari 0,05, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual berdistribusi normal (Mansuri, 2016).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Kehadiran multikolinearitas dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi bias dan tidak reliabel. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas, analisis dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas terjadi ketika terdapat korelasi yang cukup kuat antar variabel bebas dalam model. Nilai tolerance menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu dijelaskan oleh variabel independen lainnya, sedangkan VIF mengukur kebalikannya (Ghozali, 2016).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual dalam model regresi, yaitu apakah variansi residual dari satu observasi ke observasi lainnya bersifat konstan atau tidak. Pedoman dalam menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas berdasarkan Uji Glejser adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Prob. Chi-Square Obs\*R-Square  $< 0,05$ , artinya ada masalah heteroskedastisitas dalam model.
2. Jika nilai Prob. Chi-Square Obs\*R-Square  $> 0,05$ , artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya Ghozali (2016). Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (times series).

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Breusch-Godfrey LM (Lagrange Multiplier) Test. Hasil uji LM Test dapat dilihat dari nilai Probabilitas Obs\* R Squared pada kolom Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

1. Jika nilai Prob. Obs\*R-squared  $> \alpha = 0,05$  (5%), maka tidak terjadi autokorelasi.
2. Sebaliknya, jika nilai Prob. Obs\*R-squared  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi

### Uji Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

Uji F, atau yang juga dikenal sebagai uji simultan, digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dapat digunakan dengan cara membandingkan F hitung dengan Tabel F: F Tabel dalam Excel, jika F hitung  $>$  dari F tabel, ( $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima) maka model signifikan. Dan sebaliknya jika F hitung  $<$  F tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha. Model signifikan selama kolom signifikansi (%)  $<$  Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti itu sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Kriteria pengujian dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) 5% (0,05) adalah:  $H_0$  ditolak, jika nilai Signifikansi F  $< 0,05$  dan  $H_a$  diterima, jika nilai Signifikansi F  $> 0,05$ .

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dalam model regresi (Ghozali, 2016). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat. Secara umum, Uji t menunjukkan kekuatan hubungan antara satu variabel penjelas (independen) dengan variabel yang dijelaskan (dependen), tanpa mempertimbangkan variabel bebas lainnya dalam model. Sebelum menginterpretasikan hasil uji, nilai t tabel terlebih dahulu ditentukan sebagai dasar perbandingan.

3. Uji  $R^2$  (Uji Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada pada rentang antara 0 hingga 1. Nilai  $R^2$  yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam



menjelaskan perubahan pada variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai  $R^2$  yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa hampir seluruh variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Apabila nilai Adjusted  $R^2$  (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) menunjukkan angka negatif, maka nilai tersebut dianggap nol, karena tidak memberikan kontribusi tambahan dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil  
Analisis *Inclusive Growth Index* (IGI)

Tabel 1 Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan  
Provinsi Sulawesi Utara

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2018	-5.48	6.00	Tidak Inklusif
2	2019	-6.55	5.65	Tidak Inklusif
3	2020	465.14	0.99	Inklusif
4	2021	79.41	4.16	Inklusif
5	2022	24.50	5.42	Inklusif
6	2023	1.16	5.48	Tidak Inklusif
7	2024	-1.76	5.39	Tidak Inklusif
Rata-rata		79.49	4.73	Inklusif

Sumber: Hasil Olahan, Excel

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada beberapa periode penelitian, nilai koefisien pertumbuhan inklusif di Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah konsisten mencapai pertumbuhan yang inklusif. Pola ini terlihat jelas pada tahun 2018 dan 2019, di mana Pertumbuhan Ekonomi (Gg) yang tinggi gagal menekan kemiskinan, ditandai dengan nilai IGp negatif -5.48 dan -6.55, yang mengindikasikan status tidak inklusif. Kondisi ini berbalik pada periode 2020 hingga 2022 di mana pertumbuhan berstatus inklusif bahkan pada krisis 2020, pertumbuhan ekonomi terendah 0.99% menghasilkan IGp tertinggi 465.14, menunjukkan adanya efek *pro-poor* yang kuat saat itu. Namun, status kembali menjadi tidak inklusif pada tahun 2023 dan 2024, meskipun pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%. Ini menegaskan bahwa meskipun secara rata-rata statusnya Inklusif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara belum bersifat inklusif secara struktural dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang memprioritaskan strategi *pro poor* agar setiap kenaikan ekonomi mampu berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Tabel 2 Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pengangguran  
Provinsi Sulawesi Utara

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2018	-5.48	6.00	Tidak Inklusif
2	2019	-6.55	5.65	Tidak Inklusif
3	2020	465.14	0.99	Inklusif
4	2021	79.41	4.16	Inklusif

5	2022	24.50	5.42	Inklusif
6	2023	1.16	5.48	Tidak Inklusif
7	2024	-1.76	5.39	Tidak Inklusif
Rata-rata		79.49	4.73	Inklusif

Sumber: Hasil Olahan, Excel

Pada table diatas terlihat bahwa dinamika inklusivitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara mengalami fluktuasi selama periode 2018–2024. Pada tahun 2018 dan 2019, nilai IGp masing-masing sebesar –5,48 dan –6,55, sehingga keduanya dikategorikan tidak inklusif meskipun pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5–6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan belum menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi kemudian berubah pada tahun 2020, ketika IGp naik tajam menjadi 465,14 walaupun pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 0,99 persen akibat pandemi. Tingginya nilai IGp mengindikasikan bahwa berbagai program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Tren inklusif berlanjut pada tahun 2021 dan 2022 dengan IGp masing-masing 79,41 dan 24,50 seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, nilai IGp kembali melemah menjadi 1,16 dan –1,76 sehingga kedua tahun tersebut masuk kategori tidak inklusif, meskipun pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata dan tidak cukup kuat mendorong perbaikan kesejahteraan kelompok masyarakat terbawah. Secara keseluruhan, rata-rata IGp selama periode pengamatan adalah 79,49 yang berarti secara umum pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Utara dapat dipandang mengarah pada pertumbuhan inklusif, meskipun tidak terjadi secara konsisten setiap tahun.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Gini Ratio  
Provinsi Sulawesi Utara

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2018	-5.48	6.00	Tidak Inklusif
2	2019	-6.55	5.65	Tidak Inklusif
3	2020	465.14	0.99	Inklusif
4	2021	79.41	4.16	Inklusif
5	2022	0.00	5.42	Tidak Inklusif
6	2023	1.16	5.48	Tidak Inklusif
7	2024	-1.76	5.39	Tidak Inklusif
Rata-rata		75.99	4.73	Inklusif

Sumber: Hasil Olahan, Excel

Tabel diatas menunjukkan dinamika Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGp) dan Gini Ratio (Gg) atau ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2018–2024. Secara umum, hasil perhitungan memperlihatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan perbaikan pemerataan pendapatan, sehingga banyak tahun yang dikategorikan tidak inklusif. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 6,00% justru diikuti nilai IGp negatif yaitu–5.48, sehingga pertumbuhan tahun tersebut dikategorikan tidak inklusif. Pola yang sama terlihat pada tahun 2019, ketika pertumbuhan ekonomi berada pada 5,65%, tetapi IGp turun lebih dalam menjadi –6.55. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga ketimpangan tetap tinggi. Situasi berubah signifikan pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi merosot tajam menjadi 0,99%, nilai IGp melonjak sangat tinggi hingga 465.14, yang menunjukkan kondisi inklusif. Hal ini menggambarkan bahwa pada masa perlambatan ekonomi akibat pandemi,



pemerataan pendapatan justru membaik dan manfaat pertumbuhan lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,16%, dan nilai IGp tetap berada pada kategori Inklusif dengan skor 79.41. Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pada tahun tersebut berhasil memberikan distribusi manfaat yang lebih merata. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, pola kembali berubah. Meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada kisaran 5,39%–5,48%, nilai IGp berada pada tingkat sangat rendah, bahkan beberapa di antaranya negatif. Pada 2022 nilai IGp 0.00, pada 2023 sebesar 1.16, dan pada 2024 turun ke –1.76, sehingga ketiga tahun tersebut dikategorikan Tidak Inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan peningkatan pemerataan kesejahteraan. Secara keseluruhan, nilai rata-rata IGp selama periode penelitian berada pada 75.99, yang berarti bahwa secara agregat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara masih dapat dikategorikan Inklusif. Namun, pola yang tidak konsisten antar tahun menunjukkan bahwa inklusivitas masih rapuh dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi tertentu.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/20/25 Time: 17:34

Sample: 2017 2024

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.04060	19.81281	-0.658191	0.5464
X1	-3.967379	3.994965	-0.993095	0.3769
X2	-1.586347	1.882184	-0.842822	0.4468
X3	154.0544	80.90667	1.904101	0.1296
R-squared	0.644214	Mean dependent var		4.677500
Adjusted R-squared	0.377374	S.D. dependent var		2.374001
S.E. of regression	1.873245	Akaike info criterion		4.400074
Sum squared resid	14.03618	Schwarz criterion		4.439795
Log likelihood	-13.60030	Hannan-Quinn criter.		4.132173
F-statistic	2.414234	Durbin-Watson stat		2.155007
Prob(F-statistic)	0.206988			

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (data diolah)

Berdasarkan tabel dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -13.04060 - 3.967379 - 1.586347 + 154.0544 + et$$

- Konstanta (C): Sebesar -13.04060. Ini berarti, jika variabel X1,X2, dan X3 bernilai nol, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi (Y) diprediksi sebesar -13.04060 persen. (Namun,

interpretasi konstanta sering kali tidak relevan dalam konteks ekonomi jika  $X=0$  adalah kondisi yang tidak realistis).

- Koefisien  $X_1$  (Penduduk Miskin): Sebesar -3.967379. Artinya, dengan asumsi  $X_2$  dan  $X_3$  konstan (tetap), setiap peningkatan 1% Persentase Penduduk Miskin ( $X_1$ ) akan menurunkan Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) sebesar 3.97 persen.
- Koefisien  $X_2$  (TPT): Sebesar -1.586347. Artinya, dengan asumsi  $X_1$  dan  $X_3$  konstan, setiap peningkatan 1% Tingkat Pengangguran Terbuka ( $X_2$ ) akan menurunkan Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) sebesar 1.59 persen.
- Koefisien  $X_3$  (Gini Ratio): Sebesar +154.0544. Artinya, dengan asumsi  $X_1$  dan  $X_2$  konstan, setiap peningkatan 1 unit Gini Ratio ( $X_3$ ) akan meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) sebesar 154.05 persen.

## Hasil Uji Hipotesis

### 1. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Uji t Parsial bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ) secara individu. Keputusan signifikansi didasarkan pada Probabilitas (Prob.) dari masing-masing variabel dibandingkan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ).

1. Pengaruh Persentase Penduduk Miskin ( $X_1$ ) terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ). Koefisien  $X_1$  adalah negatif sebesar -3.967379, menunjukkan bahwa secara teoritis peningkatan kemiskinan akan menurunkan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Namun, nilai Probabilitas untuk  $X_1$  adalah 0.3769. Karena nilai Probabilitas (0.3769) lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Penduduk Miskin ( $X_1$ ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2017-2024. Artinya, Hipotesis Nol ( $H_0$ ) diterima.
2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka ( $X_2$ ) terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ). Koefisien  $X_2$  adalah negatif sebesar -1.586347, menunjukkan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurunkan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Namun, nilai Probabilitas untuk  $X_2$  adalah 0.4468. Karena nilai Probabilitas (0.4468) lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka ( $X_2$ ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ). Artinya, Hipotesis Nol ( $H_0$ ) diterima.
3. Pengaruh Gini Ratio ( $X_3$ ) terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ). Koefisien  $X_3$  adalah positif sebesar +154.0544, menunjukkan bahwa peningkatan Gini Ratio (ketimpangan) justru berkorelasi positif dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Nilai Probabilitas untuk  $X_3$  adalah 0.1296. Karena nilai Probabilitas (0.1296) lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa Gini Ratio ( $X_3$ ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ). Artinya, Hipotesis Nol ( $H_0$ ) diterima.

### 2. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Nilai Probabilitas F-statistic adalah 0.206988. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang umum digunakan,  $\alpha = 0.05$  (atau 5%), maka model regresi secara keseluruhan TIDAK signifikan. Artinya, variabel Persentase Penduduk Miskin ( $X_1$ ), Tingkat Pengangguran Terbuka ( $X_2$ ), dan Gini Ratio ( $X_3$ ) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ( $Y$ ) pada periode 2017–2024. Hipotesis Nol ( $H_0$ ) yang menyatakan tidak ada pengaruh simultan, diterima.

### 3. Hasil Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi)

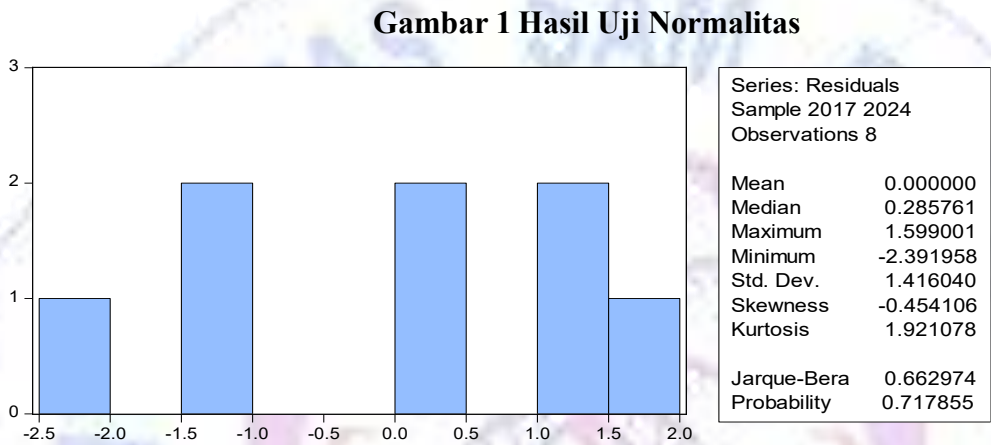
Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi total variasi pada variabel terikat ( $Y$ ) yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) secara bersama-sama.



1. R-squared (0.644214): Angka ini menunjukkan bahwa 64.42% dari total variasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Persentase Penduduk Miskin (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), dan Gini Ratio (X3). Sisanya, 35.58% (100% - 64.42%), dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi ini.A
2. Adjusted R-squared (0.377374): Nilai ini, yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dan ukuran sampel, lebih baik untuk perbandingan model. Nilai 37.74% menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan derajat kebebasan, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat menjadi lebih rendah.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Sumber: Hasil Output Eviews 12 (data diolah)

Dalam uji statistik Jarque-Bera, keputusan normalitas didasarkan pada nilai Probabilitas (Probability):

- Jika Probabilitas > 0.05: Residual terdistribusi Normal.
- Jika Probabilitas ≤ 0.05: Residual tidak terdistribusi Normal.

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera Nilai Probabilitas adalah 0.717855, Nilai Probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa residual model regresi ini terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam regresi OLS terpenuhi.

2. Uji Multikolonearitas

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolonearitas**

Variance Inflation Factors

Date: 11/20/25 Time: 18:47

Sample: 2017 2024

Included observations: 8

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	392.5473	894.9382	NA
X1	15.95975	2016.974	4.265051

X2	3.542618	354.0045	2.323709
X3	6545.889	2095.400	2.380293

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (data diolah)

Secara umum, kriteria untuk mendeteksi multikolinearitas menggunakan VIF adalah:

- $VIF \leq 10$ : Model bebas dari masalah multikolinearitas.
- $VIF > 10$ : Model terdapat masalah multikolinearitas yang serius.

Berdasarkan hasil uji Variance Inflation Factor (VIF), Nilai VIF untuk semua variabel bebas (X1,X2, dan X3) berada di bawah 10. Nilai tertinggi adalah 4.265051 (untuk X1). Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas yang serius dalam model regresi ini. Hubungan antara variabel-variabel bebas cukup aman sehingga tidak mengganggu akurasi dan stabilitas estimasi koefisien regresi (OLS).

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	4.569755	Prob. F(3,4)	0.0881
Obs*R-squared	6.193036	Prob. Chi-Square(3)	0.1026
Scaled explained SS	2.047679	Prob. Chi-Square(3)	0.5626

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji Glejser Nilai Probabilitas Obs\*R-squared adalah 0.1026. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Varians residual bersifat konstan (memenuhi asumsi Homoskedastisitas), sehingga hasil estimasi koefisien OLS adalah efisien.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.225216	Prob. F(2,2)	0.8162
Obs*R-squared	1.470537	Prob. Chi-Square(2)	0.4794

Sumber: Hasil Output Eviews 12 (data diolah)

Dalam Uji Breusch-Godfrey, keputusan didasarkan pada nilai Probabilitas Chi-Square (atau Probabilitas F-statistic):

- Jika Probabilitas  $>0.05$  Model bebas dari masalah Autokorelasi.



- Jika Probabilitas  $\leq 0.05$  Model mengalami masalah Autokorelasi.

Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey, Nilai Probabilitas Chi-Square (Obs\*R-squared) adalah 0.4794. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Autokorelasi dalam model regresi ini. Asumsi tidak adanya korelasi serial antar residual terpenuhi, sehingga hasil estimasi koefisien OLS adalah konsisten.

### Pembahasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)  
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Persentase Penduduk Miskin (X1) memiliki koefisien negatif sebesar -3.967379. Secara teoretis, tanda negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemiskinan akan cenderung menghambat dan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Interpretasi ini konsisten dengan literatur pembangunan yang menyebutkan bahwa kemiskinan membatasi potensi ekonomi melalui penurunan daya beli masyarakat, rendahnya investasi pada modal manusia (kesehatan dan pendidikan), serta kurangnya akses kelompok miskin terhadap sumber daya produktif. Namun, berdasarkan Uji-t, nilai Probabilitas untuk X1 adalah 0.3769. Karena nilai ini jauh lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , disimpulkan bahwa secara parsial, persentase penduduk miskin (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2018–2024. Artinya, fluktuasi angka kemiskinan belum menjadi pendorong statistik utama dalam menentukan tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pengaruh Tingkat Pengangguran (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)  
Tingkat Pengangguran (X2) juga menunjukkan koefisien negatif, yaitu sebesar -1.586347. Interpretasi negatif ini sejalan dengan teori ekonomi makro, di mana peningkatan pengangguran cenderung menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Pengangguran merepresentasikan pemborosan sumber daya manusia produktif, yang secara langsung mengurangi *output* potensial daerah dan total permintaan agregat. Akan tetapi, nilai Probabilitas untuk X2 adalah 0.4468. Karena nilai ini lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ , disimpulkan bahwa secara parsial, tingkat pengangguran terbuka (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengangguran adalah masalah struktural, dalam konteks model ini, perubahannya tidak secara statistik menentukan percepatan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh Tingkat Ketimpangan (X3) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)  
Gini Ratio (X3), sebagai proksi ketimpangan pendapatan, menunjukkan hasil yang menarik dengan koefisien positif yang sangat besar, yaitu +154.0544. Koefisien positif yang tinggi ini mengindikasikan adanya korelasi bahwa peningkatan ketimpangan justru berkorelasi dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi. Interpretasi empiris ini sering dikaitkan dengan fenomena di mana pertumbuhan didorong oleh investasi dari kelompok kaya yang memiliki proporsi tabungan yang tinggi, atau pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal yang hasilnya dinikmati secara tidak merata. Namun demikian, nilai Probabilitas untuk X3 adalah 0.1296. Meskipun ini adalah nilai terdekat dengan batas 0.05, karena masih lebih besar, disimpulkan bahwa secara parsial, Gini Ratio (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Y).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan dengan metode *Inklusif Growth Index* (IGI), terhadap hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2018–2024, dapat disimpulkan bahwa secara agregat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam kategori inklusif, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai rata-rata IGI yang berada pada kategori inklusif.

1. Dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan, hasil perhitungan IGI menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara umum telah memberikan kontribusi terhadap penurunan

kemiskinan. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata IGI yang berada pada kategori inklusif, meskipun pada beberapa tahun tertentu masih ditemukan kondisi pertumbuhan yang tidak inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi telah mulai menjangkau kelompok miskin, namun intensitas dan konsistensinya masih perlu diperkuat agar dampaknya lebih merata.

2. Dalam hubungannya dengan tingkat pengangguran, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara telah bersifat inklusif terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai IGI yang tergolong inklusif menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi mampu mendorong penurunan pengangguran. Namun demikian, adanya fluktuasi nilai IGI mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja belum berjalan stabil sepanjang periode penelitian, sehingga efektivitas pertumbuhan dalam mengurangi pengangguran masih perlu ditingkatkan.
3. Dalam hubungannya dengan tingkat ketimpangan pendapatan, nilai rata-rata IGI menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara umum mengarah pada pertumbuhan inklusif. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tahun dengan nilai IGI rendah dan negatif, yang menandakan bahwa proses pemerataan belum berlangsung secara konsisten. Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan pertumbuhan tergolong inklusif, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dalam kebijakan pembangunan daerah.
4. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara telah mengarah pada pertumbuhan inklusif, tetapi belum berlangsung secara merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah pada kelompok miskin, penciptaan lapangan kerja produktif, serta penguatan distribusi pendapatan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga adil dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan dengan metode regresi linear berganda, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara parsial, variabel Tingkat Kemiskinan (X1) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, meskipun arah hubungan menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan cenderung menekan pertumbuhan ekonomi, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan berpengaruh dalam periode 2017–2024.
2. Secara parsial, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan kata lain, kenaikan angka pengangguran memang secara teori dapat menahan laju pertumbuhan, tetapi dalam model penelitian ini perubahan tingkat pengangguran belum memberikan dampak yang berarti secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Secara parsial, variabel Gini Ratio (X3) menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan tidak terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap naik turunnya pertumbuhan ekonomi, meskipun koefisiennya menunjukkan arah hubungan yang cenderung positif.

## Saran

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sulawesi Utara ini menggunakan dua metode utama, yaitu *Inclusive Growth Index* (IGI) dan analisis regresi linear berganda. Hasil perhitungan IGI menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori inklusif selama periode observasi. Namun, temuan ini kontras dengan hasil analisis regresi linear berganda yang menyimpulkan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), dan Gini Ratio (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Perbedaan hasil ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memastikan koneksi langsung antara upaya inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang terukur. Berdasarkan temuan ganda ini, penelitian ini merumuskan saran sebagai berikut:



### 1. Saran untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Meskipun indeks pertumbuhan ekonomi Inklusif menunjukkan tren positif, hasil analisis regresi justru mengindikasikan bahwa program-program yang sudah berjalan belum memiliki efektivitas dan daya ungkit yang cukup kuat untuk menciptakan dampak yang terukur secara statistik terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan alokasi program pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Evaluasi ini harus diikuti dengan perumusan strategi pembangunan yang lebih inklusif dengan memperkuat kualitas data, meningkatkan cakupan dan akurasi sasaran program sosial, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat rentan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, perluasan akses modal usaha bagi UMKM, dan penguatan program pemberdayaan ekonomi produktif, demi menjamin bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan koneksi dampak yang signifikan secara statistik.

### 2. Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini dilakukan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang perlu diakui, terutama pada periode data yang terbatas (hanya 8 tahun) dan definisi operasional variabel yang digunakan, sehingga dapat memengaruhi hasil non-signifikan yang diperoleh. Keterbatasan-keterbatasan ini sangat disarankan untuk penelitian di masa depan. Untuk menyempurnakan kajian mengenai analisis pertumbuhan ekonomi inklusif, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode waktu (data *time series*) penelitian lebih dari 8 tahun demi memperkuat model ekonometrika dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat. Selain itu, dianjurkan untuk melakukan kajian lanjutan dengan menggunakan metode data panel, yaitu menggabungkan data deret waktu (*time series*) dan data lintas sektoral (*cross-section*) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini akan memberikan variasi data yang lebih kaya dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang mencerminkan dimensi inklusivitas secara lebih holistik, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akses terhadap infrastruktur dasar, atau penggunaan metode pengukuran ketimpangan lainnya selain Gini Ratio.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1), 44-57.
- Al, M., & Subrata, A. (2018). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Amalina, D. H. (2022). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(3), 25-35.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asnawi, E. G., Engka, D. S., & Walewangko, E. N. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(3), 19-35.
- Astuti, W. (2015). *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Deepublish.
- A'yun, Q., & Zainuri. (2023). The effects of inequality and poverty on inclusive economic development in East Java Province. *The 4th International Conference on Economics, Business and Information Technology*, 194-204.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.

- Boediono. (2002). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Damayanti, H., Sasana, H., & Prakoso, J. A. (2023). Analisis Pertumbuhan Inklusif Dalam Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(3), 642–651.
- Elvira, R., Suryawati, & Jarnasy. (2018). *Analisis Kemiskinan: Perspektif Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Febrianto, R. (2017). Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi: Uji Hipotesis Kuznets di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 145–158.
- Giofano, J. S., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2024). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(3), 25–36.
- Hamuyad (2008). *Kemiskinan dan Pangan*. Bogor: IPB Press.
- Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2018). *Kemiskinan Multidimensi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hapsari, W. R. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 106–116.
- Hestin, R., & Nurwani. (2017). *Kemiskinan dan Pembangunan di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, I., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta. *Jurnal Economia*, 14(1), 200–210.
- Jarnasy. (2018). *Analisis Kemiskinan: Perspektif Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lestari, F. A., Ballo, F. W., & Kiak, N. T. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016–2020. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 11(1), 51–70.
- Malthus, T. R. (1798). *An Essay On The Principle Of Population*. London: J. Johnson.
- Mankiw, N. G. (2000). *Principles Of Economics*. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers.
- Mubyarto. (2004). *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: LP3ES.
- North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258.
- Oktavia, A. N. (2024). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 8(2), 152–163.
- Pratama, A. R. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Jambi Tahun 2014–2018. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1–61.
- Rotinsulu, T. O. (2024). *Metodologi Penelitian*. Unsrat Press
- Sadono, S. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sholeh. (2010). *Kemiskinan Sebagai Masalah Multidimensi*. Bogor: IPB Press.
- Sirojuzilam. (2008). *Regional Planning and Development: Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Medan: USU Press.



- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Sugiyarto, G. (2015). Distribusi Pendapatan dan Kurva Lorenz: Analisis Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 75–88.
- Suharto (dalam Hestin, R., & Nurwani). (2017). *Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Lembaga
- Sungkar, M. (2015). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dengan Gini Rasio di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 16(2), 101–115.
- Sweezy, P. M. (1942). *The Theory Of Capitalist Development*. New York, NY: Monthly Review Press.
- Tambun, R. (2001). *Statistik Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tambunan (dalam Mauna, B., dkk.). (2018). *Kemiskinan Multidimensi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tarigan, R. (2015). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development (11th Ed.)*. Boston: Addison-Wesley.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th Ed.)*. Boston: Pearson Education.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human development report 1990*. New York: Oxford University Press.
- World Bank. (2009). *World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *World Development report 2020: Trading For Development In The Age Of Global Value Chains*. Washington, DC: World Bank.
- Yuliani, S. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Analisis Kurva Kuznets di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1), 45–59.